

Analisis Representasi Kekuasaan Politik Film *Dirty Vote* Dalam Perspektif Norman Fairclough

1stNur Vania Fitra, 2ndJoko J. Prihatmoko

Universitas Wahid Hasyim Semarang

vaniafr@gmail.com

Abstract

Dirty Vote is an effective mass communication medium in delivering social and political criticism, especially of democratic practices in Indonesia ahead of the 2024 elections. Released during the quiet period, this film raises allegations of fraud and power intervention in the electoral process. This research aims to analyze the representation of political power in *Dirty Vote* from Norman Fairclough's perspective. This research uses a qualitative methodological framework to analyze six excerpts of scenes as representations of political power. The results of the analysis show that language in films is used strategically to shape public opinion and convey ideological messages about certain figures and institutions. Discourse practices reflect the process of film production and distribution in a political context full of interests, while socio-cultural practices reveal the relationship between film narratives and power structures in society. Thus, *Dirty Vote* does not only function as a documentary work, but also as a tool of discourse criticism that dismantles the dominance of power and voices public aspirations for a more ethical and transparent democracy.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Representation of Power, Documentary Film, *Dirty Vote*

Abstrak

Film *Dirty Vote* merupakan media komunikasi massa yang efektif dalam menyampaikan kritik sosial dan politik, khususnya terhadap praktik demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Dirilis pada masa tenang, film ini mengangkat dugaan kecurangan dan intervensi kekuasaan dalam proses elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kekuasaan politik film *Dirty Vote* dalam perspektif Norman Fairclough. Penelitian ini menggunakan kerangka metodologi kualitatif untuk menganalisis enam cuplikan adegan sebagai representasi kekuasaan politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa dalam film digunakan secara strategis untuk membentuk opini publik dan menyampaikan pesan ideologis mengenai tokoh maupun institusi tertentu. Praktik wacana mencerminkan proses produksi dan distribusi film dalam konteks politik yang sarat kepentingan, sementara praktik sosial-budaya menyingkap hubungan antara narasi film dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, *Dirty Vote* tidak hanya berfungsi sebagai karya dokumenter, tetapi juga sebagai alat kritik wacana yang membongkar dominasi kekuasaan dan menyuarakan aspirasi publik terhadap demokrasi yang lebih etis dan transparan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough, Representasi Kekuasaan, Film Dokumenter, *Dirty Vote*

A. Pendahuluan

Film merupakan media komunikasi massa yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat edukasi dan penyampaian pesan sosial serta politik.¹ Di Indonesia, film memiliki pengaruh sosial yang signifikan, karena mampu menyentuh aspek emosional penonton dan menciptakan imajinasi sosial terhadap isu-isu yang diangkat.² Perkembangan teknologi komunikasi semakin memperluas fungsi film, termasuk dalam dunia politik, di mana film kini banyak digunakan untuk menyampaikan retorika, kritik sosial, propaganda, dan kampanye yang berkaitan dengan kekuasaan.

Salah satu genre film yang paling kuat dalam menyampaikan realitas sosial adalah film dokumenter. Dokumenter berperan penting dalam merepresentasikan kenyataan dan fakta yang dihadapi masyarakat secara langsung.³ Film dokumenter *Dirty Vote* menjadi contoh signifikan karena dirilis tepat menjelang Pemilu 2024 dan mengangkat kritik terhadap dugaan intervensi kekuasaan dalam proses demokrasi di Indonesia. Film ini dirilis melalui kanal *YouTube* PSHK Indonesia pada 11 Februari 2024, yaitu bertepatan dengan masa tenang kampanye. Dengan durasi hampir dua jam, film ini menampilkan narasi, data, dan opini dari akademisi, jurnalis, serta pegiat antikorupsi yang menyuarakan dugaan pelanggaran etika dan demokrasi dalam pemilu.⁴ *Dirty Vote* tidak secara langsung menuduh adanya pelanggaran hukum, melainkan menampilkan konstruksi wacana melalui sudut pandang masyarakat sipil yang mengkritisi tindakan elite politik dan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Representasi tersebut penting untuk dianalisis secara lebih objektif melalui pendekatan hukum positif dan prinsip-prinsip dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menjadi penting karena tidak semua kritik sosial yang ditampilkan dalam film berarti pelanggaran hukum secara tekstual. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pentingnya membedakan antara legalitas formal suatu tindakan dan legitimasi etis dari sudut pandang masyarakat sipil.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji *Dirty Vote* sebagai produk komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk representasi kekuasaan politik dalam praktik wacana yang dikonstruksi melalui

¹ Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal 43.

² Afira Novita, Pesan Moral dalam Film Tasisiah Bukannyo Tabuang, *Skripsi*, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022, hal 21.

³ Aldo Syahrul Huda, Film Sebagai Media dalam Mengubah Cara Pandang Manusia dalam Prinsip Kemanusiaan, *IRAMA: Jurnal Seni Desain dan Pembelajarannya*, Volume 5, Nomor 1, 2023, hal 11.

⁴ Tya Eka Yulianti, Heboh Film *Dirty Vote* ini 7 Fakta di Baliknyanya, URL: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7188446/heboh-film-dirty-vote-ini-7-fakta-di-baliknyanya>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024.

media visual. Penelitian ini mengungkap teori Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough, yang memungkinkan pembacaan teks film secara lebih mendalam melalui tiga dimensi: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Berbeda dari penelitian terdahulu yang banyak menggunakan teori semiotika (misalnya Barthes), penelitian ini mengambil pendekatan kritis terhadap wacana kekuasaan yang dibentuk melalui bahasa dan visual film. Fairclough menekankan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana produksi, reproduksi, dan transformasi kekuasaan dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi kekuasaan politik film *Dirty Vote* dalam perspektif Norman Fairclough. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kekuasaan politik direpresentasikan dalam narasi, visual, serta konstruksi diskursif film *Dirty Vote* menggunakan pendekatan tiga dimensi Fairclough, yaitu analisis teks (mikro), praktik wacana (meso), dan praktik sosial (makro). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis; secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian representasi kekuasaan dalam media film serta memperluas penerapan teori wacana kritis dalam studi komunikasi politik; sedangkan secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa film dokumenter seperti *Dirty Vote* bukan hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik yang dapat membentuk kesadaran publik terhadap pentingnya etika kekuasaan, netralitas birokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi substantif dalam kehidupan bernegara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk mengkaji representasi kekuasaan politik dalam film *Dirty Vote*. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap makna, konteks, dan konstruksi sosial yang ditampilkan dalam film, sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena representasi kekuasaan yang dikemas secara visual dan naratif.⁵ Sumber data primer berasal dari dokumentasi film *Dirty Vote* yang dianalisis secara berulang melalui cuplikan-cuplikan penting, sedangkan sumber data sekunder berupa referensi literatur, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung yang relevan.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi (*capturing scene*) dari

⁵ Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif*, Jakarta : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hal 72.

⁶ Muhammad Mulyadi, Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Volume 16, Nomor, 2012, hal 74.

beberapa adegan kunci dalam film yang menampilkan isu seperti penunjukan Pj kepala daerah, distribusi bansos, hingga peran Mahkamah Konstitusi, serta studi pustaka yang memperkuat pemahaman teoritis. Analisis data menggunakan tiga dimensi utama dalam model Fairclough: (1) dimensi teks,⁷ dengan menganalisis struktur bahasa, pilihan kata, dan representasi aktor dalam film; (2) praktik wacana, yang mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi pesan film oleh publik; serta (3) praktik sosial-budaya, yang menghubungkan representasi film dengan konteks sosial, politik, dan institusional di Indonesia menjelang Pemilu 2024.⁸ Pendekatan ini memungkinkan kajian yang holistik terhadap bagaimana film *Dirty Vote* membentuk dan menyebarkan makna politik kekuasaan dalam ruang publik.

C. Pembahasan dan Temuan

Penelitian ini membahas representasi kekuasaan dalam film dokumenter *Dirty Vote* dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kekuasaan politik direpresentasikan melalui media film sebagai bentuk praktik sosial, serta bagaimana representasi tersebut membentuk pemahaman masyarakat terhadap fenomena politik di Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2024. Studi ini dikembangkan dari berbagai penelitian terdahulu yang turut mengangkat tema serupa, seperti film *Autobiography*,⁹ *The Fox Exploit The Tiger's Might*,¹⁰ *The War on Democracy*,¹¹ dan *Kentut*.¹² Meski objek dan pendekatan berbeda, benang merah dari semua penelitian tersebut adalah pemetaan kekuasaan dan kritik terhadap praktik demokrasi melalui media visual.¹³ Secara umum, pendekatan teori semiotika Roland Barthes lebih banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Sebaliknya, penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan pendekatan wacana kritis untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik di balik teks film.

Film dipahami sebagai medium komunikasi massa yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, persuasif, dan ideologis. Sebagai artefak budaya, film

⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: Lkis, 2001, hal 286.

⁸ *Ibid*, hal 287.

⁹ Dian Yulastuti, Representasi Kekuasaan dan Kekerasan dalam Film *Autobiography* Karya Sutradara Makbul Mubarak dalam Perspektif Roland Barthes, *Jurnal Intelektiva*, Volume 7, Nomor 2, 2023, hal 9.

¹⁰ Rachmawati Artono, Representasi Kekuasaan dalam Film *The Fox Exploit The Tiger's Might*, *Jurnal E-Komunikasi* Vol 6 No. 1, 2018, hal 9.

¹¹ Romy Rizki, Representasi Propaganda Demokrasi dalam Film *The War on Democracy*, *Skripsi*, Universitas Komputer Indonesia, 2014, hal 124.

¹² Dian Nurlizta Aryani, Representasi Pilkada dalam Film *Kentut*, *Skripsi*, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012, hal 96.

¹³ Malva Nafisha Daltafika Masrur, et.all, Representasi Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Menutupi Sebuah Kasus Pada Film *Autobiography*, *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, hal 888.

dapat membentuk opini publik dan merepresentasikan realitas sosial tertentu. Film dokumenter khususnya memiliki karakter sebagai media non-fiksi yang menyajikan realitas aktual dengan intensi menyampaikan kebenaran, membentuk opini, dan dalam beberapa kasus, melakukan kritik terhadap sistem kekuasaan yang berlaku. Representasi tidak dipahami sebagai cerminan pasif dari kenyataan, melainkan sebagai proses konstruksi makna. Merujuk pada pandangan Stuart Hall, representasi adalah produksi makna melalui bahasa dan simbol, yang berperan penting dalam membentuk realitas sosial dan politik. Hall menyatakan bahwa representasi bukan hanya menggambarkan dunia, melainkan juga menciptakan dunia tersebut di benak publik. Konsep representasi juga dibedah melalui pemikiran Hanna Pitkin, yang membedakan representasi menjadi empat tipe: formal, substantif, simbolik, dan deskriptif. Teori ini diperluas oleh Michael Saward yang menekankan pada *representational claim*, yakni representasi sebagai bentuk klaim oleh aktor non-elektoral seperti masyarakat sipil atau pembuat film dokumenter, terhadap kepentingan publik yang dianggap diabaikan oleh negara. Dalam hal ini, film *Dirty Vote* dapat diposisikan sebagai bentuk representasi informal yang berfungsi sebagai media kritik terhadap proses politik formal.

Kekuasaan politik yang menjadi fokus utama penelitian ini juga dibedah melalui berbagai perspektif klasik dan kontemporer. Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya meskipun mendapat perlawanan. Robert Dahl, Steven Lukes, dan Talcott Parsons menyumbangkan model-model analisis kekuasaan yang menyoroti dimensi pengambilan keputusan, pengaruh ideologis, dan hubungan asimetris antara pemegang kuasa dan yang dikuasai. Foucault, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian wacana, menawarkan pemahaman yang lebih dinamis terhadap kekuasaan. Kekuasaan menurutnya tidak dimiliki, tetapi dijalankan melalui jaringan praktik sosial dan institusi.¹⁴ Kekuasaan hadir dalam bentuk wacana yang memproduksi pengetahuan, dan justru bekerja secara laten melalui proses normalisasi serta regulasi, bukan dominasi terang-terangan.¹⁵ *Dirty Vote* menjadi arena di mana praktik kekuasaan dalam wacana dapat diidentifikasi melalui konstruksi naratif dan visual

Analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan untuk membedah tiga level utama dalam teks film: dimensi tekstual (*micro*), praktik wacana (*meso*), dan praktik sosial-budaya

¹⁴ Budi Irawanto, *Film, Ideologi dan Militer, Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*, Yogyakarta: Jalasutra, 1999, hal 5.

¹⁵ Sobur, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal 126.

(macro).¹⁶ Level mikro berfokus pada representasi, relasi, dan identitas dalam teks. Analisis ini menggali bagaimana bahasa dalam film digunakan untuk membingkai kekuasaan dan mengarahkan interpretasi publik.¹⁷ Misalnya, pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan footage visual yang menunjukkan aktor-aktor politik tertentu sebagai simbol penyimpangan kekuasaan.¹⁸ Level *meso* mengkaji bagaimana film diproduksi dan dikonsumsi sebagai wacana. Di sini, peran pembuat film, latar belakang sosial mereka, serta strategi naratif yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik dikaji secara kontekstual. *Dirty Vote* tidak hanya dipahami sebagai karya artistik, melainkan sebagai produk diskursif yang memiliki intensi politik.¹⁹ Level makro mengkaji bagaimana kondisi sosial, politik, dan budaya membentuk dan dibentuk oleh teks film.²⁰ *Dirty Vote* hadir untuk meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap elite politik dan proses elektoral. Representasi dalam film ini menggambarkan adanya relasi kuasa yang timpang antara negara dan masyarakat sipil, serta digunakannya instrumen kekuasaan seperti bantuan sosial sebagai alat politik transaksional. Dalam kerangka analisis Fairclough, teks film dapat mengandung ideologi tertentu yang membentuk opini publik. Analisis ini mengurai bagaimana dominasi kekuasaan dapat berlangsung melalui representasi media yang tampak netral, namun sesungguhnya sarat makna politis.²¹ Praktik sosial budaya yang menyertai produksi *Dirty Vote* mencerminkan ketegangan antara logika demokrasi formal dan aspirasi publik untuk keadilan sosial.

1. Representasi Kekuasaan dan Simbol Perlawanan Terhadap Ketidakadilan Pemilu

Dalam film dokumenter *Dirty Vote*, simbol gerakan empat jari digunakan sebagai bentuk komunikasi politik untuk menyampaikan pesan perlawanan terhadap ketidakadilan dalam Pemilu 2024. Dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough, makna gerakan ini dapat dipahami melalui tiga dimensi utama: teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya.

¹⁶ Alvons Habibie, Comparison Between Discourse Analysis and Critical Discourse Analysis From Linguistics Now, *Journal Al-Lisan*, Volume 1 Nomor 2, 2015, hal 9.

¹⁷ Elya Munfarida, Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough, *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Volume 8, Nomor 1, 2016, hal 2.

¹⁸ *Ibid*, hal 3

¹⁹ Ariyanti Rahayu, Analisis Wacana Kritis Berita Pemberantasan Korupsi di TV ONE Sebagai Reaktualisasi Teks Wacana dalam Pembelajaran di SMP, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hal 10.

²⁰ *Ibid*, hal 14

²¹ Umar Fauzan, Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough Hingga Mills, *Jurnal Pendidik*, Volume 6, Nomor 1, 2014, hal 9.

Gambar 1. Gerakan 4 Jari



Sumber: Foto Tangkapan Layar Film Dirty Vote pada Youtube PSHK Indonesia

Zainal, salah satu narator dalam film, menyatakan bahwa gerakan empat jari “seakan menjadi simbol penggabungan kekuatan 01 dan 03”. Pernyataan ini menggunakan modalitas seperti “seakan” dan “menjadi simbol”, yang memperlihatkan gaya komunikasi sugestif namun politis. Ungkapan “penggabungan kekuatan” dan “tawaran” mengandung muatan ideologis yang mencerminkan harapan akan perlawanan terhadap calon nomor 02 yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Bahasa ini tidak netral, ia membentuk makna dan membingkai realitas politik sesuai posisi ideologis film. Teks ini juga menunjukkan intertekstualitas dengan merujuk pada wacana politik yang sudah beredar, seperti dugaan manipulasi kekuasaan atau praktik koalisi elite. Struktur kalimat, pilihan diksi, dan narasi visual seperti gestur tangan dalam bentuk empat jari membangun kesan perlawanan, sekaligus menawarkan simbol baru dalam peta politik Indonesia.

Simbol ini tidak muncul secara netral, tetapi diproduksi oleh aktor-aktor dengan agenda tertentu: pembuat film yang berasal dari kalangan akademisi dan aktivis demokrasi. Gerakan empat jari menjadi bagian dari strategi simbolik untuk menandingi narasi dominan kekuasaan. Penerimaan masyarakat terhadap simbol ini beragam: sebagian melihatnya sebagai bentuk kesadaran kritis, sementara sebagian lainnya menilai sebagai penggiringan opini publik. Penguatan makna terjadi melalui media dan diskursus publik. Jika simbol ini diadopsi secara luas, ia dapat mengalami reartikulasi makna, menjadi alat perjuangan bersama atau hanya tren politis sementara. Namun, representasi yang diangkat film ini cenderung menonjolkan elite intelektual, dengan minimnya representasi dari kelompok rentan seperti perempuan atau masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa meskipun wacana film bersifat kritis, ia belum sepenuhnya inklusif.

Gerakan empat jari menjadi bagian dari resistensi terhadap ketidaknetralan aktor negara, seperti aparat, pejabat, dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dianggap digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Film ini merepresentasikan negara bukan sebagai pelindung

warga, melainkan sebagai instrumen politik kekuasaan. Ini mencerminkan krisis legitimasi dan wibawa negara dalam narasi pembuat film.

Dari perspektif Fairclough, bahasa dan simbol bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga representasi kekuasaan dan ideologi. Pernyataan Zainal membingkai pemilu sebagai arena kepentingan elite, sembari menegaskan pentingnya partisipasi rakyat. Meski begitu, rakyat tetap direpresentasikan lebih sebagai simbol ketimbang agen aktif, mencerminkan relasi kuasa yang tetap elitis. Gerakan empat jari dalam *Dirty Vote* merepresentasikan simbol perlawanan terhadap dominasi politik dan menjadi bagian dari wacana ideologis untuk membangun demokrasi yang lebih partisipatif. Ia bukan sekadar gestur, melainkan ekspresi kritik terhadap struktur kekuasaan yang timpang dan upaya mengembalikan peran rakyat dalam proses politik.

2. Analisis Representasi Kekuasaan Politik dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah di Film *Dirty Vote*

Film dokumenter *Dirty Vote* secara tajam mengkritisi bagaimana kekuasaan politik bekerja di balik layar menjelang Pemilu 2024, khususnya melalui praktik penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Dalam narasi film, penunjukan Pj tidak hanya dipertanyakan dari aspek prosedural, melainkan juga dari sisi etika dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Melalui analisis wacana kritis Norman Fairclough, film ini mengungkap dimensi-dimensi kekuasaan yang tersembunyi namun berdampak besar terhadap demokrasi elektoral.

Gambar 2. 20 Pj Gubernur dipilih Presiden dan 182 Pj Walikota



Sumber: Foto Tangkapan Layar Film Dirty Vote pada Youtube PSHK Indonesia

Secara teks (mikro), film menggunakan narasi dan diksi yang menggugah emosi untuk menunjukkan ketimpangan antara rakyat dan elite kekuasaan. Salah satu kutipan menegaskan: “...demo besar-besaran kepala desa... menghancurkan fasilitas DPR...,” yang merefleksikan keresahan akar rumput terhadap pengabaian suara rakyat. Kata-kata seperti “janji-janji harus segera dipenuhi” membentuk tekanan moral terhadap negara agar bertindak adil.

Pada dimensi praktik wacana (meso), film ini merupakan produk aktivisme politik yang lahir dari keprihatinan akademisi dan masyarakat sipil terhadap degradasi netralitas birokrasi.

Kritik utama diarahkan pada proses penunjukan Pj yang dinilai tidak transparan, minim partisipasi publik, dan sarat kepentingan politik. Narasi ini dibangun dengan mengaitkan konteks politik nasional, intervensi kekuasaan eksekutif, serta ketidakseimbangan peran antara pejabat publik dan aturan pemilu.

Dalam praktik sosial budaya (makro), penunjukan Pj di potret sebagai bentuk reproduksi kekuasaan yang melanggengkan patronase politik.²² Di tengah lemahnya pendidikan politik dan ketimpangan ekonomi, Pj menjadi instrumen strategis dalam memobilisasi dukungan elektoral. Hal ini memperlihatkan bagaimana praktik yang sah secara hukum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis kekuasaan.²³

Penunjukan Pj Kepala Daerah diatur dalam Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.²⁴ Pasal ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk Pj Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk Pj Bupati/Wali Kota, yang berasal dari kalangan ASN dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Mekanisme teknisnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, khususnya Pasal 4–Pasal 9, yang menyebutkan kriteria calon, proses seleksi, dan pertimbangan instansi terkait.²⁵ Film *Dirty Vote* tidak menuduh bahwa proses ini melanggar hukum, melainkan mempertanyakan netralitas dan akuntabilitasnya. Kritik yang disampaikan lebih menekankan pada bagaimana kekuasaan yang “sah secara hukum” bisa dijalankan dengan cara yang tidak etis secara politik dan berpotensi melemahkan demokrasi substantif.

3. Analisis Film *Dirty Vote* dalam Sorotan Politik Uang dan Bansos

Film *Dirty Vote* secara kritis menyoroti penyalahgunaan anggaran bantuan sosial (bansos) pada periode 2014–2024, yang ditampilkan sebagai alat politik menjelang Pemilu 2024. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (Fairclough), film ini membongkar bagaimana kenaikan signifikan anggaran bansos yang terekam dalam grafik dan visualisasi data tidak sekadar berfungsi sebagai kebijakan sosial, melainkan strategi untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam wacana yang dibangun, bansos menjadi bagian dari populisme elektoral, alat untuk menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga berpotensi mengganggu keadilan demokratis.

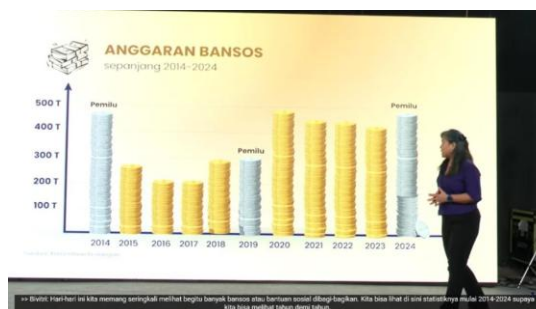
²² Otto Gusti Madung, Korupsi, Patronase dan Demokrasi, *Jurnal Ledalero*, Volume 15, Nomor 1, 2016, hal. 16.

²³ Saiful Asra, Fandhy Mauliansyah, Money Politics Sebagai Representasi Budaya Patron-Client Dalam Pemilu: Perspektif Sosiologi Politik, *Jurnal Society*, Volume 4, Nomor 2, 2024, hal. 98.

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²⁵ mendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Gambar 3. Data Anggaran Bansos Tahun 2014- 2024



Sumber: Foto Tangkapan Layar Film Dirty Vote pada Youtube PSHK Indonesia

Film ini menampilkan pilihan kata yang sarat muatan ideologis dan kritik politik. Misalnya, narator menggunakan diksi seperti “kecurangan yang dilegalkan,” “penyalahgunaan kekuasaan,” “bansos dipolitisasi,” dan “penunjukan pejabat yang strategis untuk kepentingan elektoral.” Struktur kalimat yang lugas dan repetitif memperkuat kesan urgensi dan krisis etika. Visualisasi grafik kenaikan anggaran bansos tahun 2020–2024, yang ditampilkan tanpa narasi netral, semakin mempertegas bahwa distribusi bansos bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan alat kampanye terselubung. Dalam penggambaran tokoh-tokoh seperti Presiden, menteri, hingga kepala daerah, film ini memakai footage arsip yang dikombinasikan dengan narasi sarkastik dan simbolisme visual, seperti tangan membagikan sembako, sorotan kamera ke baliho politisi, dan penekanan pada kata “netralitas” yang dikontraskan dengan tindakan mereka.

Pada praktik wacana, *Dirty Vote* diproduksi oleh koalisi akademisi dan aktivis hukum sebagai respon terhadap kekhawatiran akan degradasi etika politik dalam kontestasi demokrasi. Produksi film ini merupakan bagian dari strategi “interdiskursivitas” menggabungkan diskursus hukum, etika politik, dan komunikasi visual dokumenter. Narasi akademik dipakai untuk memperkuat legitimasi kritik, serta memanfaatkan media digital sebagai alat distribusi cepat dan masif di kalangan pemilih muda.

Wacana bansos dan penunjukan Pj kepala daerah dipertautkan dengan kerangka legal formal:

- Penunjukan Pj berdasar Pasal 201 ayat (10–11) UU No. 10 Tahun 2016,
- Diperjelas lewat Permendagri No. 4 Tahun 2023,
- Sementara anggaran bansos dibenarkan oleh Pasal 23 UUD 1945 dan Perpres terkait.

Dirty Vote tidak menggugat legalitas, melainkan menggarisbawahi deviasi etis, di mana kebijakan publik digunakan untuk kepentingan elektoral melalui timing, framing, dan kontrol narasi.

Dalam praktik sosial budaya, *Dirty Vote* menggarisbawahi bahwa budaya politik uang telah mengakar kuat, termasuk dalam konteks Pilkada dan Pilkadaes. Distribusi bansos, pembagian sembako, serta janji proyek pembangunan ditampilkan sebagai bentuk nyata politik transaksional. Kesenjangan sosial dimanfaatkan untuk meraih dukungan elektoral, mengaburkan prinsip keadilan dalam demokrasi. Film ini juga memperlihatkan bahwa politik uang memicu korupsi struktural, di mana kandidat yang “membeli” suara cenderung menyalahgunakan jabatan untuk mengembalikan modal politik, menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara luas.

Dirty Vote tidak serta-merta menuduh bahwa kebijakan bansos atau penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah melanggar hukum. Sebaliknya, film ini menunjukkan bahwa semua kebijakan tersebut sah secara hukum positif. Penunjukan Pj, misalnya, diatur dalam Pasal 201 ayat (10–11) UU No. 10 Tahun 2016, serta diperjelas melalui Permendagri No. 4 Tahun 2023. Sementara anggaran bansos dilindungi oleh Pasal 23 UUD 1945 dan berbagai regulasi teknis lain. Namun, kritik utama film ini adalah pada aspek etika dan waktu pelaksanaan kebijakan yang bertepatan dengan momentum elektoral. *Dirty Vote* menyuguhkan narasi tandingan terhadap legitimasi kebijakan negara. Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat legalitas formal, tetapi juga mempertanyakan etika politik, netralitas kebijakan, dan keseimbangan kekuasaan. Film ini menjadi alat perlawanan simbolik terhadap konsolidasi kekuasaan yang dibalut kebijakan populis. Dalam konteks demokrasi Indonesia, film ini menjadi pengingat bahwa legalitas tidak selalu menjamin keadilan, kewaspadaan publik terhadap praktik politik uang dan manipulasi kebijakan menjadi syarat mutlak untuk menjaga integritas demokrasi yang sejati.

4. Representasi Mekanisme Kekuasaan dalam Pilpres 2024

Film *Dirty Vote* menyoroti bagaimana kekuasaan dimanipulasi menjelang Pilpres 2024, terutama melalui distribusi bantuan sosial (bansos) dan strategi populisme elektoral. Salah satu simbol utama yang diangkat adalah konsep “Gentong Babi” (*Pork Barrel Politics*), sebuah metafora dari politik anggaran transaksional, yang dalam konteks Indonesia diasosiasikan dengan penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral petahana.

Gambar. Politik Gentong Babi Ala Jokowi



Sumber: Foto Tangkapan Layar Film Dirty Vote pada Youtube PSHK Indonesia

Pada level mikro, film ini secara eksplisit membingkai kekuasaan sebagai alat manipulatif. Dalam adegan penting, Bivitri Susanti menjelaskan bahwa bansos digunakan sebagai strategi politik, dengan menyebut konsep “gentong babi.” Visualisasi Jokowi membawa tong berisi babi mendramatisasi makna tersebut. Bahasa yang digunakan, seperti “alat politik,” “penyalahgunaan,” dan “transaksional,” menunjukkan bagaimana kebijakan negara dibingkai sebagai sarana meraih suara, bukan pelayanan publik netral. Narasi dan visual membangun hubungan simbolik antara kekuasaan dan manipulasi, menjadikan teks film sebagai kritik tajam terhadap praktik politisasi bansos.

Pada praktik wacana, film ini menunjukkan interdiskursivitas atau percampuran wacana global dan lokal. Konsep *pork barrel politics*, yang berasal dari politik Amerika Serikat, diadaptasi dalam konteks Indonesia untuk mengungkap penyalahgunaan anggaran negara. Selain itu, film ini memadukan gaya dokumenter politik, jurnalisme investigatif, dan aktivisme hukum. Gabungan ini menciptakan ruang wacana yang menantang narasi resmi negara. Dalam kerangka Fairclough, ini memperlihatkan bagaimana pelaku wacana (akademisi, aktivis, sineas) berupaya merebut ruang diskursif untuk mengedukasi publik tentang praktik manipulatif dalam demokrasi elektoral.

Secara makro, *Dirty Vote* menggambarkan bahwa praktik seperti bansos transaksional berakar dalam struktur sosial-politik yang permisif terhadap politik uang dan klientelisme. Distribusi bansos secara politis mencerminkan relasi kuasa antara negara dan masyarakat rentan, khususnya perempuan dan kelompok miskin yang menjadi target utama iming-iming materi. Dalam sistem patriarkal dan ekonomi rentan, pemilih (terutama perempuan) direpresentasikan sebagai kelompok yang bisa dieksploitasi, tetapi juga memiliki potensi menjadi agen perubahan. Beberapa tokoh dalam film digambarkan berani menolak politik uang, memperlihatkan bahwa kesadaran kritis tetap mungkin tumbuh meski dalam tekanan struktural.

5. Representasi Kekuasaan Politik dan Institusi Negara

Dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough, representasi kekuasaan politik dan institusi negara dalam Pilpres 2024 sebagaimana digambarkan dalam film *Dirty Vote* dapat dianalisis melalui pendekatan Norman Fairclough.

Gambar 5. Representasi Kekusaan Oleh Institusi Negara Pada Pemilu 2024



Sumber: Foto Tangkapan Layar Film Dirty Vote pada Youtube PSHK Indonesia

Dalam film *Dirty Vote*, narasi yang disampaikan Bivitri Susanti mengenai keterlibatan para menteri dalam kampanye Pilpres 2024 menjadi titik kritis analisis. Ia menyebut adanya kampanye terselubung oleh menteri-menteri yang tidak terdaftar secara resmi di KPU sebagai tim sukses. Dalam adegan tersebut, data disajikan secara visual untuk mendukung argumen bahwa pejabat publik telah menyalahgunakan posisinya demi kepentingan politik tertentu. Kutipan seperti, “Kategori ketiga adalah menteri-menteri yang diduga melakukan kampanye terselubung,” mengindikasikan bahwa praktik kekuasaan tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga melalui bahasa yang menyiratkan pelanggaran etika dan hukum. Ini menjadi representasi tekstual bahwa kekuasaan sedang dimainkan dalam ruang abu-abu, di luar kerangka legal formal.

Di level meso, film ini menyoroti bagaimana penggunaan institusi negara termasuk kementerian, birokrasi, dan media telah mengalami politisasi. Menteri yang digaji dengan dana publik dan seharusnya netral dalam pemilu, justru ditampilkan sebagai aktor partisan. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang melarang pejabat negara melakukan kampanye kecuali telah cuti. Tindakan para menteri tersebut menunjukkan adanya interdiskursivitas, yaitu percampuran antara diskursus negara (netralitas) dengan diskursus politik elektoral (partisanship). Film ini juga menunjukkan bagaimana media dipakai sebagai alat untuk memperkuat narasi tertentu dan memperlemah pihak oposisi. Hal ini juga sesuai dengan kajian Fairclough tentang hegemoni wacana, yakni dominasi satu narasi terhadap narasi lainnya demi melanggengkan kekuasaan.

Secara sosial budaya, *Dirty Vote* menyoroti struktur sosial-politik yang memungkinkan praktik seperti ini terjadi. Ketika menteri menggunakan jabatannya untuk menyebarkan pengaruh politik, hal ini memperkuat sistem patronase dan politik klientelistik. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih memiliki ketimpangan sosial-ekonomi tinggi, penyalahgunaan kekuasaan ini sangat efektif karena target utamanya adalah kelompok rentan. Film ini mengangkat bagaimana kemiskinan struktural dan ketimpangan kelas membuat masyarakat akar rumput menjadi sasaran empuk politik uang dan bansos yang bersifat transaksional. Sebaliknya, elite politik yang memiliki akses terhadap modal dan sumber daya negara memanfaatkan ketimpangan tersebut untuk memperkuat cengkeraman politiknya. Ini menciptakan lingkaran setan kekuasaan, di mana kekuasaan direproduksi melalui eksploitasi terhadap ketidaksetaraan. Fenomena ini menggambarkan dominasi struktural, di mana aparat negara yang seharusnya netral justru ikut mempertajam ketimpangan demokrasi. Secara teori, ini sesuai dengan pandangan Fairclough bahwa wacana tidak netral, ia selalu mencerminkan relasi kekuasaan dalam masyarakat, dan seringkali berfungsi untuk mempertahankan status quo.

Dirty Vote berhasil menunjukkan bagaimana institusi negara direpresentasikan sebagai instrumen kekuasaan partisan dalam Pilpres 2024. Melalui pendekatan Fairclough, film ini menyingkap bahwa kekuasaan tidak hanya berlangsung melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui bahasa, simbol, dan representasi visual yang membentuk kesadaran publik. Dengan menyoroti praktik terselubung kampanye oleh pejabat publik, film ini tidak hanya mengungkap penyimpangan aturan formal, tetapi juga membuka wacana untuk mengkritisi relasi kuasa dalam sistem demokrasi Indonesia. Film ini juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis publik terhadap bagaimana negara, elit politik, dan struktur sosial bekerja saling terkait dalam proses reproduksi kekuasaan. Reformasi kebijakan dan penguatan etika politik menjadi keharusan untuk mencegah institusi negara menjadi alat kekuasaan semata.

6. Representasi Kekuasaan Politik dan Lembaga Yudikatif Dalam Pilpres 2024

Film *Dirty Vote* mengangkat realitas politik kontemporer Indonesia menjelang Pemilu 2024, dengan fokus pada lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai aktor kunci dalam konfigurasi kekuasaan politik. Dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough, representasi MK dalam film ini dipecah dalam tiga dimensi: teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya.

Gambar 6. Kontradiksi Mahkamah Konstitusi



Sumber: Foto Tangkapan Layar Film Dirty Vote pada Youtube PSHK Indonesia

Secara tekstual, *Dirty Vote* menampilkan narasi-narasi verbal dan visual yang menunjukkan kontradiksi dalam putusan MK, terutama terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membuka peluang bagi calon berusia di bawah 40 tahun, dengan syarat pernah menjabat melalui pemilu. Narasi ini dilengkapi dengan testimoni dan data hukum, termasuk hubungan kekeluargaan antara Ketua MK saat itu, Anwar Usman, dengan Presiden Joko Widodo. Kata-kata yang digunakan dalam film cenderung bersifat argumentatif dan persuasif, dengan tone kritis terhadap netralitas lembaga hukum. Visualisasi sidang MK dan kutipan dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta UUD 1945 memperkuat kesan bahwa keputusan hukum, meski sah secara normatif, bias dalam konteks politik.²⁶

Pada tingkat praktik wacana, film ini menyoroti bagaimana MK dipersepsikan oleh media, elit politik, dan masyarakat sebagai lembaga yang seharusnya netral tetapi malah menunjukkan keberpihakan. Praktik wacana ini direproduksi melalui narasi media, diskusi publik, hingga reaksi resmi seperti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menyatakan bahwa Anwar Usman melanggar etik berat dan mencopotnya dari jabatan Ketua MK.²⁷ Melalui pendekatan ini, *Dirty Vote* menyampaikan bahwa MK bukan sekadar pelaksana undang-undang, melainkan bagian dari konstruksi hegemoni kekuasaan. Hal ini sesuai dengan Fairclough bahwa wacana tidak netral, tetapi syarat ideologi yang membentuk struktur dominasi dalam masyarakat.

Secara sosial-budaya, representasi MK dalam film mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Keputusan MK, yang secara konstitusional sah, menjadi problematis karena waktu dan konteks politik yang mengindikasikan konflik kepentingan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kekuasaan

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

²⁷ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: 5/MKMK/L/11/2023, URL: https://s.mkri.id/public/content/mkmmk/mkmmk_putusan_1699362723_f298cdead7a49cdd8837.pdf, diakses pada tanggal 21 Juli 2025

yudikatif telah menjadi instrumen dari kekuatan politik-ekonomi yang dominan, bukan lagi penjaga konstitusi secara independen. Film ini juga menunjukkan bahwa proses demokrasi Indonesia tidak hanya dibentuk oleh aturan hukum, tetapi oleh kekuatan sosial dan ekonomi di baliknya. Ketimpangan akses terhadap sumber daya politik dan hukum menjadikan demokrasi sebagai alat reproduksi kekuasaan elit, bukan ruang partisipasi rakyat secara setara.

Dalam aspek hukum positif, MK memang memiliki kewenangan menguji UU berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, termasuk memutus uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, secara etis, kehadiran faktor relasi personal antara hakim dan aktor politik menimbulkan krisis legitimasi. Film ini dengan demikian berhasil mengungkap batas samar antara legalitas formal dan keadilan substantif. Sebagaimana Fairclough tekankan, struktur kekuasaan dalam masyarakat tidak hanya dibentuk melalui hukum, tetapi juga oleh legitimasi ideologis yang dibangun melalui wacana. *Dirty Vote* tidak hanya mengajak penonton untuk menyimak pelanggaran formal, tetapi juga merefleksikan kondisi struktural yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Hal ini mencakup peran partai politik, pembiayaan pemilu, dan lemahnya pendidikan politik publik. Reformasi yudisial dan politik tidak hanya soal mengubah aturan, tetapi mengubah budaya politik dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas kelembagaan.

D. Simpulan

Film *Dirty Vote* merupakan karya dokumenter yang menampilkan kritik tajam terhadap praktik kekuasaan menjelang Pemilu 2024 di Indonesia. Melalui narasi investigatif dan wawancara dengan para akademisi hukum, film ini membangun wacana publik yang menyoroti persoalan etika, integritas, dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan politik, khususnya dalam penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah, putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon wakil presiden, serta penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah pusat. Analisis wacana kritis menggunakan pendekatan tiga dimensi Norman Fairclough (teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya), ditemukan bahwa representasi kekuasaan dalam film tidak didasarkan pada pembuktian pelanggaran hukum formal secara eksplisit, melainkan disusun dalam bentuk kritik sosial dan etis terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi. Kritik yang dibangun lebih menekankan pada ketimpangan relasi kuasa, konflik kepentingan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam konteks yang secara hukum tetap berada dalam koridor legalitas formal. Secara yuridis, kebijakan-kebijakan yang dikritisi dalam

film, seperti pengangkatan Pj Kepala Daerah dan distribusi bansos, memiliki dasar hukum yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, dan Permendagri No. 4 Tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga berada dalam wilayah kewenangan konstitusional lembaga tersebut. Namun demikian, film *Dirty Vote* menggarisbawahi adanya persoalan etik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti konflik kepentingan, ketidaknetralan birokrasi, serta penyaluran bantuan yang dianggap strategis secara politis. Film *Dirty Vote* berfungsi sebagai bentuk intervensi wacana publik yang bertujuan menggugah kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik kekuasaan dalam demokrasi elektoral. Film ini tidak serta-merta mengajukan tuduhan hukum, tetapi membangun narasi yang problematis secara moral dan sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang secara legal masih dapat dibenarkan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap isi film perlu dibaca dalam konteks diskursus politik dan sosial yang lebih luas, bukan sebagai bentuk analisis yuridis atau dakwaan hukum formal.

Daftar Pustaka

Buku

- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Halik, A. (2013). *Komunikasi massa*. Makassar: Alauddin University Press.
- Irawanto, B. (1999). *Film, ideologi dan militer: Hegemoni militer dalam sinema Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Nawawi, I. (2012). *Metoda penelitian kualitatif*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Sobur, A. (2004). *Semiotika komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal

- Artono, R. 2018. Representasi Kekuasaan dalam Film The Fox Exploit The Tiger's Might. *Jurnal E-Komunikasi*, 6(1): 9.
- Asra, S., & Mauliansyah, F. 2024. *Money Politics* sebagai Representasi Budaya Patron-Client dalam Pemilu: Perspektif Sosiologi Politik. *Jurnal Society*, 4(2): 98.
- Fauzan, U. 2014. Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough hingga Mills. *Jurnal Pendidik*, 6(1): 9.
- Habibie, A. 2015. *Comparison Between Discourse Analysis and Critical Discourse Analysis from Linguistics Now*. *Journal Al-Lisan*, 1(2): 9.

- Huda, A. S. 2023. Film sebagai Media dalam Mengubah Cara Pandang Manusia dalam Prinsip Kemanusiaan. *IRAMA: Jurnal Seni Desain dan Pembelajarannya*, 5(1): 11.
- Madung, O. G. 2016. Korupsi, Patronase dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*, 15(1): 16.
- Masrur, M. N. D., et al. 2023. Representasi Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Menutupi Sebuah Kasus pada Film *Autobiography*. *Prosiding Seminar Nasional*, hlm. 888.
- Mulyadi, M. 2012. Riset Desain dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1): 74.
- Munfarida, E. 2016. Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1): 2–3.
- Yulianti, D. 2023. Representasi Kekuasaan dan Kekerasan dalam Film *Autobiography* Karya Sutradara Makbul Mubarak dalam Perspektif Roland Barthes. *Jurnal Intelektiva*, 7(2): 9.

Skripsi

- Aryani, Dian Nurlizta, Representasi Pilkada dalam Film Kentut, *Skripsi*, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012, hal 96.
- Novita, Afira, Pesan Moral dalam Film Tasisiah Bukannyo Tabuang, *Skripsi*, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022, hal 21-22.
- Rahayu, Ariyanti, Analisis Wacana Kritis Berita Pemberantasan Korupsi di TV ONE Sebagai Reaktualisasi Teks Wacana dalam Pembelajaran di SMP, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hal 10-14.
- Rizki, Romy, Representasi Propaganda Demokrasi dalam Film *The War on Democracy*, *Skripsi*, Universitas Komputer Indonesia, 2014, hal 124

Sumber Daring/Internet

- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: 5/MKMK/L/11/2023, URL: https://s.mkri.id/public/content/mkrmk/mkrmk_putusan_1699362723_f298cdead7a49cd_d8837.pdf, diakses pada tanggal 21 Juli 2025.
- Yulianti, Tya Eka, Heboh Film Dirty Vote ini 7 Fakta di Balikny, URL: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7188446/heboh-film-dirty-vote-ini-7-fakta-di-balikny>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.